

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 049 TAHUN 2023
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. BURHANUDIN
Jabatan : Bupati Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
- b. Nama : SULADI, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Manggar, Tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR

SELAKU,
PIHAK PERTAMA

Drs.BURHANUDIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SELAKU,
PIHAK KEDUA

FEZZI UKTOLSEJA, SE, MM

KETUA

SULADI, SE
WAKIL KETUA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JUMLAH SEBELUM PEMBAHASAN	JUMLAH SETELAH PEMBAHASAN	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	868.777.075.953	872.862.492.573	4.085.416.620	0,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.907.410.230	109.992.826.850	4.085.416.620	3,86
4.1.01	Pajak Daerah	53.682.416.586	55.682.416.586	2.000.000.000	3,73
4.1.02	Retribusi Daerah	3.964.451.342	3.964.451.342	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.282.259.902	5.523.052.522	1.240.792.620	28,98
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.978.282.400	44.822.906.400	844.624.000	1,92
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.619.915.723	761.619.915.723	0	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	722.177.973.740	722.177.973.740	0	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.441.941.983	39.441.941.983	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	1.249.750.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000	249.750.000	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5	BELANJA DAERAH	975.480.144.047	984.615.779.255	9.135.635.208	0,94
5.1	BELANJA OPERASI	774.314.543.840	787.353.167.748	13.038.623.908	1,68
5.1.01	Belanja Pegawai	422.655.610.432	413.365.449.864	-9.290.160.568	-2,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.195.456.567	346.280.668.543	24.085.211.976	7,48
5.1.05	Belanja Hibah	27.657.476.841	25.901.049.341	-1.756.427.500	-6,35
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.806.000.000	1.806.000.000	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	99.981.245.387	96.078.256.687	-3.902.988.700	-3,90
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.584.714.187	23.840.804.187	-3.743.910.000	-13,57
5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.012.826.200	29.898.621.500	-114.204.700	-0,38
5.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.335.941.000	41.335.941.000	0	0,00
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	899.448.000	899.448.000	0	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	148.316.000	103.442.000	-44.874.000	-30,26
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	100.184.354.820	100.184.354.820	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.916.208.946	5.916.208.946	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.268.145.874	94.268.145.874	0	0,00
Total Surplus/(Defisit)		-106.703.068.094	-111.753.286.682	-5.050.218.588	4,73
6	PEMBIAYAAN DAERAH	106.703.068.094	111.753.286.682	5.050.218.588	4,73
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	110.703.068.094	115.753.286.682	5.050.218.588	4,56
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	110.703.068.094	115.753.286.682	5.050.218.588	4,56
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000		
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Drs. BURHANUDIN

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

FEZZI URTOLSEJA, SE, MM

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

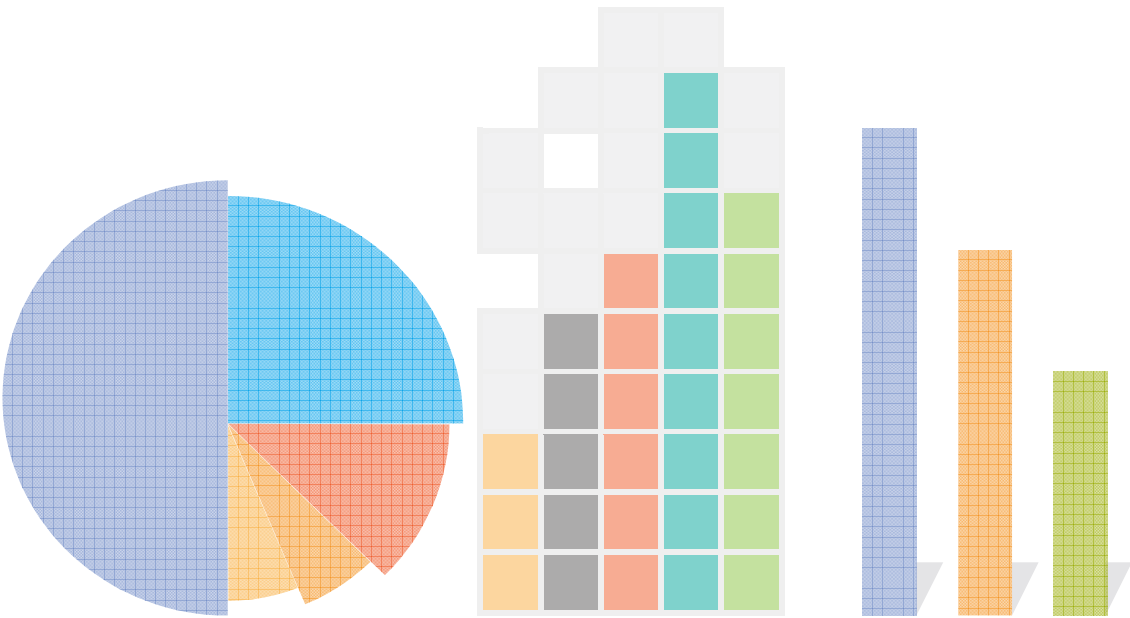
SULADI, SE



RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA

PPAS

- PENDAPATAN DAERAH
- BELANJA DAERAH
- PEMBIAYAAN DAERAH



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1

1.2 Tujuan dan Dasar Penyusunan PPAS 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS..... 3

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 7

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 11

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH
DAN PROGRAM/KEGIATAN..... 28

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 127

BAB VI PENUTUP 129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Penerimaan Daerah 8

Tabel 3.1 Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022– 2024..... 13

Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Nasional 18

Tabel 3.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi..... 21

Tabel 3.5 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah 24

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan 53

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Daerah, prioritas Provinsi dan prioritas Nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur diarahkan sesuai misi kedua dalam RPJMD yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Adapun tema pembangunan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 adalah: **“Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar”**

Beberapa isu yang masih menjadi perhatian di Tahun 2024 adalah kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi, akibat pandemi *Covid-19*, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi. Namun, kita bersyukur di tengah guncangan-guncangan besar gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kerja sama yang sangat baik dan dukungan dari erta seluruh komponen bangsa pada pelaksanaan berbagai program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian. Dalam satu dekade sebelum pandemi *Covid-19*, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global, bersama Tiongkok dan India.

Sedangkan beberapa isu yang masih menjadi perhatian Kabupaten Belitung Timur di Tahun 2024 adalah tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah, pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung perkuatan pembangunan ekonomi, pengendalian kualitas lingkungan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tengah

masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan daya saing ekonomi di tahun 2024 upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dilakukan dengan memaksimalkan peran sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan serta perdagangan dan jasa yang melibatkan banyak tenaga kerja serta menjangkau hampir sebagian masyarakat.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, serta berbagai permasalahan dan isu dan tantangan yang harus dipecahkan dan diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Demokrasi;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
4. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing;
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan untuk menjalankan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Nota Kesepakatan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dasar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang memuat prioritas dan plafon anggaran antara lain :

1. Rencana Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah;
2. Rencana Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
3. Rencana Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.2. Tujuan dan Dasar Penyusunan PPAS

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.
3. Tersedianya daftar prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang sesuai dengan besaran plafon anggaran yang telah dipilah.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);



34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
37. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur No 27 Tahun 2023)

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih teknis mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang Terdiri Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan analisis potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 868.777.075.953 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.048.669.146 atau 2,24% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 849.728.406.807, rincian tersebut dapat dilihat pada :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp. 105.907.410.230 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (6.034.633.976) atau -5,39% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 111.942.044.206;
- b) Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 761.619.915.723 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.705.013.067 atau 4,34% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 729.914.902.656; dan
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan berjumlah Rp. 1.249.750.000 yang mengalami penurunan sebesar Rp. -6.621.709.945 atau -84,12% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.871.459.945.



Tabel 2.1
Target Penerimaan Daerah

Kode	Penerimaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.907.410.230
4.1.01	Pajak Daerah	53.682.416.586
4.1.02	Retribusi Daerah	3.964.4513.42
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.282.259.902
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.9782.82.400
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.619.915.723
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	722.177.973.740
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.441.941.983
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	868.777.075.953

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan Untuk pajak daerah sendiri diproyeksikan kontribusi terbesarnya masih ditopang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan walaupun terdapat kecenderungan menurun realisasinya disebabkan oleh berkurangnya jumlah pengiriman mineral bukan logam yang disebabkan oleh terdapat beberapa perusahaan tambang yang sudah tidak beroperasi lagi dan perusahaan yang masih bertahan telah habis lahan produksi lama dan masih dalam proses pencarian lahan baru dan adanya pemberlakuan UU no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan bahwa tarif untuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini sebesar 20 % dari yang sebelumnya 25 % dan adanya opsen dengan Provinsi sebesar 25 %, sehingga PAD pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 105.907.410.230 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (6.034.633.976) atau (5,39)% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 111.942.044.206.

Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 53.682.416.586 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (15.136.739.084) atau (21,99)% dibandingkan target Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 68.819.155.670. Penurunan target Pajak Daerah tersebut bersumber dari komponen jenis penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Retribusi Daerah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 3.964.451.342 yang penurunan sebesar Rp. (1.086.300.658) atau (21,51)% dibandingkan target Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran. 2023 sebesar Rp. 5.050.752.000. Penetapan target Retribusi Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi Retribusi Daerah pada n-2 atau realisasi 2 (dua) tahun Anggaran sebelumnya dari Dinas/Instansi pengelola/pemungut sesuai dengan jenis pungutan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD/ Instansi pemungut;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 4.282.259.902 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2023;

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara keseluruhan ditargetkan mencapai sebesar Rp. 43.978.282.400 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.188.405.766 atau 30,15% dibandingkan target Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 33.789.876.634.

Pendapatan Transfer pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp. 761.619.915.723 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.705.013.067 atau 4,34% dibandingkan target Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 729.914.902.656.

Komponen Pendapatan Transfer tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer pada Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 722.177.973.740 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 34.970.149.740 atau 5,09% dibandingkan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 687.207.824.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer pada Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.39.441.941.983 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (3.265.136.673) atau 7,65% dibandingkan target Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 42.707.078.656.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.249.750.000 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (6.621.709.945) atau (84,12)% dibandingkan target Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp.7.871.459.945.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Komponen Pendapatan Hibah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 249.750.000 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan target Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2023

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.000.000.000 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (6.621.709.945) atau -86,88% dibandingkan target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp.7.621.709.945. Hal ini disebabkan tahun 2024 seluruh Puskesmas sudah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, sehingga sumber pendapatan semula dana kapitasi sudah berubah menjadi pendapatan BLUD

Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut yang mencapai sebesar Rp. 868.777.075.953 dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah memberi kontribusi sebesar Rp. 105.907.410.230 atau sebesar 12,19%, Pendapatan Transfer memberi kontribusi sebesar Rp. 761.619.915.723 atau sebesar 87,67% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberi kontribusi sebesar Rp. 1.249.750.000 atau sebesar 0,14%.

Berdasarkan target pendapatan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka jumlah Dana Tersedia yang dapat dimanfaatkan guna pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dari Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp.868.777.075.953.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program dan kegiatan pada Tahun 2024 ini harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhitungan belanja daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Namun terdapat beberapa kebijakan belanja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu :

- Alokasi anggaran sedikitnya 20% dari total belanja untuk bidang Pendidikan
- Alokasi anggaran sedikitnya 10% dari total belanja untuk bidang Kesehatan setelah di kurangi belanja pegawai
- Alokasi sedikitnya 40% dari DTU setelah di kurangi ADD untuk pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik
- Alokasi sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa
- Belanja pegawai maksimal 30% dari belanja APBD

Selain pemenuhan belanja wajib di atas, beberapa komponen pendapatan bersifat *earmarked* artinya penggunaannya sudah ditentukan, belanja *earmarked* yaitu pendapatan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, pendapatan BLUD, Dana Desa, dan Dana Kapitasi. Komponen pendapatan yang termasuk Dana Alokasi Non Fisik adalah Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) dan beberapa pendapatan yang sesuai dengan menu tema DAK Non Fisik. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diusulkan oleh Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang belanjanya juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan di RS. Walaupun telah menyandang status BLUD, pendanaan RSUD juga tetap didukung oleh APBD. Dana Desa adalah bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Kapitasi adalah dana besaran pembayaran per bulan yang di bayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja pegawai dialokasikan dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% untuk mengakomodir kenaikan pangkat pegawai. Belanja pegawai disini terdiri dari anggaran gaji dan tunjangan melekat dan tambahan penghasilan bagi ASN, anggota DPRD, dan Kepala Daerah. Sejak tahun 2022 pemerintah daerah telah mengarah kepada penerapan *single salary*. Dalam belanja ini juga dianggarkan belanja pegawai *earmarked*, yaitu Tunjangan Penghasilan Guru (TPG),

Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), Insentif Pemungut Pajak dan hak-hak pimpinan daerah maupun DPRD.

Belanja Barang dan jasa yang dianggarkan termasuk didalamnya penganggaran gaji untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), belanja pemeliharaan, beasiswa dan belanja jasa lainnya.

Kebijakan belanja hibah dan Bantuan Sosial di tahun 2024 tetap mengacu pada ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Baik belanja hibah maupun bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan rusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam menganggarkan Belanja modal harus disinkronkan dengan rencana kebutuhan barang yang disusun setiap tahunnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada rekening BTT ini juga termasuk didalamnya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dimana penganggarnya tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang direncanakan. Di tahun 2024 penganggaran BTT sebesar Rp. 1.000.000.000.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada jenis belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil pajak dan retribusi ke desa dan bantuan keuangan ke desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa).

Belanja bagi hasil kepada desa wajib dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dianggarkan sebesar 10% dari target pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten yang memiliki desa setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan daerah, realisasi tahun 2023 dan target APBD Tahun Anggaran 2024, maka Belanja Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 ditargetkan mencapai sebesar Rp. 975.480.144.047 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.459.358.297 atau 2,14% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp.955.020.785.750, rincian tersebut dapat dilihat pada :

- a) Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 774.314.543.840 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.320.262.844 atau 9,37% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.707.994.280.996;
- b) Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 99.981.245.387 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (35.373.111.489) atau (26,13)% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.135.354.356.876;
- c) Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (12.059.789.988) atau (92,34)% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.059.789.988; dan
- d) Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp. 100.184.354.820 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.571.996.930 atau 1,59%dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 98.612.357.890.

Berikut ini disajikan perkembangan realisasi belanja pada APBD TA.2022, dengan target tahun anggaran 2023 dan proyeksi tahun anggaran 2024.

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022– 2024

KELOMPOK BELANJA	REALISASI	APBD 2023	TARGET APBD 2024
	APBD 2022		
BELANJA	875.849.073.729,11	955.020.785.750	975.480.144.047
Belanja Operasi	652.310.550.764,50	707.994.280.996	774.314.543.840
Belanja Modal	123.645.920.737,09	135.354.356.876	99.981.245.387
Belanja Tidak Terduga	249.084.207,00	13.059.789.988	1.000.000.000
Belanja Transfer	99.643.518.020,52	98.612.357.890	100.184.354.820

Sumber data: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Berdasarkan alokasi Belanja Daerah tersebut yang mencapai sebesar Rp. 975.480.144.047 dengan komposisi Belanja Operasi memberi kontribusi sebesar Rp. 774.314.543.840 atau sebesar 79,38%, Belanja Modal memberi kontribusi sebesar Rp. 99.981.245.387 atau sebesar 10,25%, Belanja Tidak Terduga memberi kontribusi sebesar Rp. 1.000.000.000 atau sebesar 0,10%, dan Belanja Transfer memberi kontribusi sebesar Rp. 100.184.354.820 atau sebesar 10,27%.

Belanja Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Operasi secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 774.314.543.840 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.320.262.844 atau 9,37% dibandingkan alokasi Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 707.994.280.996.

Komponen Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
Belanja Operasi pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Pegawai secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 422.655.610.432 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.973.522.068 atau 7,91% dibandingkan alokasi Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 391.682.088.364;
- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Operasi pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Barang dan Jasa secara keseluruhan dialokasikan mencapai sebesar Rp.322.195.456.567 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.099.284.435 atau 7,01% dibandingkan alokasi Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran. 2023 sebesar Rp. 301.096.172.132;

c. Belanja Hibah

Belanja Operasi pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Hibah secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 27.657.476.841 yang peningkatan sebesar Rp. 13.073.456.341 atau 89,64% dibandingkan alokasi Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran. 2023 sebesar Rp. 14.584.020.500;

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Bantuan Sosial secara keseluruhan dialokasikan mencapai sebesar Rp.1.806.000.000 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.174.000.000 atau 185,76% dibandingkan alokasi Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 632.000.000.

Belanja Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Modal secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 99.981.245.387 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (35.373.111.489) atau (26,13)% dibandingkan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 135.354.356.876.

Komponen Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp.27.584.714.187 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 124.288.834 atau 0,45% dibandingkan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 27.460.425.353;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara keseluruhan dialokasikan mencapai sebesar Rp. 30.012.826.200 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.249.055.080 atau 8,10% dibandingkan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran. 2023 sebesar Rp.27.763.771.120;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 41.335.941.000 yang penurunan sebesar Rp. (37.570.062.603) atau (47,61)% dibandingkan alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran. 2023 sebesar Rp.78.906.003.603;

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya secara keseluruhan dialokasikan mencapai sebesar Rp.

899.448.000 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (324.708.800) atau (26,53)% dibandingkan alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.224.156.800; dan

e. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 148.316.000.

Belanja Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Tidak Terduga secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (12.059.789.988) atau (92,34)% dibandingkan alokasi Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.13.059.789.988.

Belanja Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Transfer secara keseluruhan sebesar Rp. 100.184.354.820 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.571.996.930 atau 1,59% dibandingkan alokasi Belanja Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 98.612.357.890.

Komponen Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Transfer pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Bagi Hasil secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 5.916.208.946 yang mengalami penurunan sebesar Rp. (1.444.173.044) atau (19,62)% dibandingkan Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.360.381.990;

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Transfer pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dari komponen Belanja Bantuan Keuangan secara keseluruhan dialokasikan mencapai sebesar Rp.94.268.145.874 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.016.169.974 atau 3,31% dibandingkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran. 2023 sebesar Rp.91.251.975.900.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional pada tahun 2024, adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan dengan tema " **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak dan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah: (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, disusun strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana di bawah ini.

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (*Programme for International Student Assessment*).

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Adapaun secara rinci prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

- Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Tabel 3.2
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PAGU (RP)
PN - 1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.282.768.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.285.158.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	218.091.000,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	89.999.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	694.291.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.994.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	252.672.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.944.639.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.048.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	122.131.500,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.194.088.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.811.793.360,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.411.711.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.005.331.000,00
PN - 2. MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.246.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	494.239.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	547.321.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.143.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	308.997.500,00
PN - 3. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.574.197.420,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.871.998.500,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	343.513.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	636.450.395,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	718.636.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.664.389.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.245.300.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.711.998.060,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	65.995.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	46.358.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.091.848.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	277.681.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	456.073.236,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	965.855.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.046.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	622.890.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	329.716.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	323.956.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	844.068.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	11.300.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000,00



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PAGU (RP)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.051.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	275.504.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	218.648.000,00
PN - 4. REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	
-	
PN - 5. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	501.736.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	751.077.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	116.180.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.858.608.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.194.149.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.270.195.631,00
PN - 6. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	534.331.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.284.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	117.774.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.072.243.958,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39.186.615,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	347.605.500,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	94.677.000,00
PN - 7. MEMPERKUAT STABILITAS POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN (POLHUKHANKAM) DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.497.500,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.557.698.410,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.129.992.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.980.214.500,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18.384.776.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.582.246.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.742.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	99.952.504.620,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	784.996.240,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.683.968.232,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	513.718.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	391.408.530,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	308.997.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.302.834.970,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	964.281.000,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.126.412.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.369.776.500,00

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025, dengan Visi:

Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju Berwawasan Lingkungan, didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera.

Misi:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah;
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Adapun Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, yaitu:

1. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
2. Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
3. Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor pertambangan dan penggalan;
4. Belum Optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan;
5. Belum Optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan;
6. Belum Optimalnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik;
7. Belum Optimalnya Pertumbuhan ekspor;
8. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah;
9. Belum Maksimalnya pembangunan manusia;
10. Menurunnya kebebasan kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi; dan
11. Belum Optimalnya pengendalian Lingkungan hidup.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 diarahkan untuk

Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Demokrasi ” dengan prioritas pembangunan utama dan pendukung :

Prioritas utama pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Lingkungan;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
4. Pembangunan Demokrasi.

Prioritas pembangunan pendukung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah;
2. Pemerataan pendapatan Masyarakat; dan
3. Pembangunan Pemerintahan.



Tabel 3.4
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PAGU (RP)
A. UTAMA	
1. PEMBANGUNAN EKONOMI	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.282.768.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.285.158.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	218.091.000,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	89.999.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	694.291.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.994.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	252.672.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.944.639.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.048.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	122.131.500,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.194.088.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.811.793.360,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.411.711.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.005.331.000,00
2. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	534.331.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.284.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	117.774.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.072.243.958,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39.186.615,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	347.605.500,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	94.677.000,00
3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.574.197.420,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.871.998.500,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	343.513.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	636.450.395,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	718.636.000,00



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PAGU (RP)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.664.389.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.245.300.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.711.998.060,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	65.995.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	46.358.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.091.848.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	277.681.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	456.073.236,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	965.855.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.046.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	622.890.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	329.716.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	323.956.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	844.068.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	11.300.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.051.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	275.504.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	218.648.000,00
4. PEMBANGUNAN DEMOKRASI	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.557.698.410,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.497.500,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.129.992.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.980.214.500,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18.384.776.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.582.246.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.742.000,00
B. PENDUKUNG	
1. PEMBANGUNAN WILAYAH	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	501.736.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	751.077.000,00



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PAGU (RP)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	116.180.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.858.608.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.194.149.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.270.195.631,00
2. PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.246.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	494.239.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	547.321.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.143.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	308.997.500,00
3. PEMBANGUNAN PEMERINTAH	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.557.698.410,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.497.500,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.980.214.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	99.952.504.620,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	784.996.240,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.683.968.232,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	513.718.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	391.408.530,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	308.997.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.302.834.970,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	964.281.000,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.126.412.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.369.776.500,00

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dan berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, serta RPJMD tahun 2021-2026, maka perumusan baik tema dan sasaran pembangunan tahun 2024 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan yang ada, dan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan tema **“Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar”**.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, serta berbagai permasalahan pada BAB II dan isu dan tantangan yang harus dipecahkan dan diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



- 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Demokrasi;
- 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
- 4. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
- 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing;
- 6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur; dan
- 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Tabel 3.5

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

PRIORITAS DAERAH	PAGU (Rp)
1. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN DEMOKRASI	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.497.500,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.557.698.410,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.129.992.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	99.952.504.620,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	784.996.240,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.683.968.232,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.386.864.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	451.632.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	391.408.530,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	513.718.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	188.122.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.290.027.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	302.261.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.742.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.954.917.841,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18.384.776.000,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.836.158.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.980.214.500,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.360.707.866,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	319.065.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	220.993.824,00



PRIORITAS DAERAH	PAGU (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	77.438.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	964.281.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.302.834.970,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.433.153.500,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.126.412.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.369.776.500,00
2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.574.197.420,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.871.998.500,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	343.513.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	636.450.395,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	718.636.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.664.389.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.245.300.000,00
3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.711.998.060,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	65.995.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	46.358.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.091.848.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	277.681.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	456.073.236,00
4. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	965.855.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.046.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	622.890.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	329.716.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	323.956.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	844.068.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	11.300.000,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.051.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	275.504.000,00



PRIORITAS DAERAH	PAGU (Rp)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	218.648.000,00
5. OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAN DAYA SAING	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	33.000.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	699.950.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	88.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.246.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	494.239.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	547.321.500,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.282.768.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.731.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	280.563.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.336.620.925,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.462.760.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	173.341.500,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.285.158.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	218.091.000,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	89.999.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	694.291.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.994.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	252.672.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.944.639.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.048.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	122.131.500,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.194.088.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	228.507.500,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.811.793.360,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.411.711.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.005.331.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.210.541.500,00



PRIORITAS DAERAH	PAGU (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	64.994.500,00
PROGRAM Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	64.971.000,00
PROGRAM Pengelolaan Permuseuman	65.000.000,00
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur	
PROGRAM Penatagunaan Tanah	501.736.400,00
PROGRAM Kawasan Permukiman	116.180.000,00
PROGRAM Pengembangan Perumahan	751.077.000,00
PROGRAM Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.858.608.000,00
PROGRAM Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.194.149.600,00
PROGRAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.582.388.100,00
PROGRAM Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.238.780.976,00
PROGRAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.270.195.631,00
PROGRAM Penataan Bangunan Gedung	500.000.000,00
PROGRAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.331.421.000,00
PROGRAM Penyelenggaraan Jalan	35.032.741.000,00
PROGRAM Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.586.215.740,00
PROGRAM Pengelolaan Pelayaran	1.695.180.337,00
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	
PROGRAM Perencanaan Lingkungan Hidup	534.331.000,00
PROGRAM Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.284.000.000,00
PROGRAM Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.343.047.194,00
PROGRAM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	117.774.000,00
PROGRAM Pengelolaan Persampahan	6.072.243.958,00
PROGRAM Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	39.186.615,00
PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	347.605.500,00
PROGRAM Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	94.677.000,00

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain Urusan Pada Setiap OPD, Ada dua kelompok Urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD se-Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu urusan penunjang dan urusan konkuren. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 (tidak termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten) dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (Delapan belas) urusan wajib Non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan, 1(satu) unsur pengawasan, 1 (satu) unsur kewilayahan - Kecamatan, 1 (satu) urusan pemerintahan umum dan 1 (satu) unsur pendukung urusan pemerintahan.

5.2.1. Program-program Prioritas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.2.1.1. Pendidikan

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan diarahkan pada

- pendidikan sekolah dasar yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pendidikan SMP yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Pendidikan PAUD yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- Pendidikan Non Formal yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
-

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kegiatan diarahkan pada

- Pendidikan dasar yaitu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yaitu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

3) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kegiatan diarahkan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4) PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

5.2.1.2. Kesehatan

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Kesehatan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Vaksin, Pengadaan Bahan Habis Pakai, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana dan Pengelolaan Surveilans Kesehatan

2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan diarahkan pada : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standard dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan

3) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Kegiatan diarahkan pada : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Kegiatan diarahkan pada : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

5.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup 9 (sembilan) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya, Pembangunan Kanal Banjir, Rehabilitasi Kanal Banjir, Rehabilitasi Kanal Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Pembangunan Bendung Irigasi, Rehabilitasi Irigasi Permukaan.

2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan,

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, serta Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan.

5) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Dengan Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

6) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.

7) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

8) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan diarahkan pada : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

9) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan diarahkan pada Pemenuhan cakupan ketersediaan rumah layak huni

Dengan Sub Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2) PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan diarahkan pada tercapainya persentase penyelenggaraan jasa konstruksi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan kegiatan yang diarahkan pada: sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil.

3) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan diarahkan pada tercapainya persentase permukiman yang tertata dengan kegiatan yang diarahkan pada : Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan melakukan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan melakukan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

4) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan diarahkan pada terpenuhinya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan kegiatan diarahkan pada : Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan dengan melakukan perencanaan penyediaan PSU di Perumahan, dan Penyediaan Prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian.

5.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu (1) PD Satpol PP dan (2) PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Satpol PP**a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat; Pengendalian keamanan, Penegakan dan penindakan pelanggaran perda, Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba, Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Kegiatan diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran; Recruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran; Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; serta Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**c. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan diarahkan pada Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana; Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam; Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara; Pelatihan dan simulasi penanganan bencana; serta Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana.

5.2.1.6. Sosial

Urusan wajib Pemerintahan Bidang Sosial ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut

1) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial berupa Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Kedaruratan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Rujukan, dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan diarahkan pada : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Rujukan Anak-Anak Terlantar, Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar, Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

4) PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

5) PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Kegiatan diarahkan pada : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

6) PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan diarahkan pada : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

5.2.2. Program-program Prioritas pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.2.2.1. Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Kegiatan diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kegiatan diarahkan pada Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota, pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

4) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan diarahkan pada Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan diarahkan pada Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.2.3. Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian dan Pangan, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemadirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berupa penyediaan infrastruktur lumbung pangan.

2) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

3) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

kegiatan diarahkan pada : Penyusunan, Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota.

4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota.

5.2.2.4. Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan diarahkan pada: Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5.2.2.5. Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup, mencakup 10 (sepuluh) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

kegiatan diarahkan pada : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

kegiatan diarahkan pada : Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

kegiatan diarahkan pada : Penyimpanan sementara Limbah B3.

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

kegiatan diarahkan pada : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

kegiatan diarahkan pada : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

7) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

8) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

kegiatan diarahkan pada : Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

kegiatan diarahkan pada : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/Kota

10) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Sampah

5.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

kegiatan diarahkan pada : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2) PROGRAM PENCATATAN SIPIL

kegiatan diarahkan pada : Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting, Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif, Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil dan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

3) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

kegiatan diarahkan pada : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4) PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain

5.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENATAAN DESA

Kegiatan diarahkan pada Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa, Fasilitas Tata Wilayah Desa, Fasilitas Penataan Kewenangan Desa, Fasilitas Penamaan dan Kode Desa Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

2) PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Kegiatan diarahkan pada Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

3) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan diarahkan pada Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa, Fasilitas Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa dan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan diarahkan pada Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

5.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian dan Penduduk ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan diarahkan pada : Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Keluarga Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal, Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK, Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan, dan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan diarahkan pada : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.

5.2.2.9. Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perhubungan, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan diarahkan pada tercapainya presentase pemenuhan infrastruktur lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan kegiatan diarahkan pada : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota melalui penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupatane/kota termasuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dan juga pengembangan sarana dan prasarana terminal, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir melalui koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Kegiatan diarahkan pada tercapainya persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran kegiatan diarahkan pada : pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai atau danau.

5.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan diarahkan pada: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan diarahkan pada: Pengelolaan Nama domain dan sub domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

kegiatan diarahkan pada : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

kegiatan diarahkan pada : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

kegiatan diarahkan pada : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

kegiatan diarahkan pada : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

kegiatan diarahkan pada : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

6) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

kegiatan diarahkan pada : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

5.2.2.12. Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Penetapan pemberian fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

5) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

5.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira usaha Pemula, Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten, Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang meliputi perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan, Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota, Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tk Daerah, Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

5.2.2.14. Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan diarahkan pada: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral, peningkatan kapasitas SDM pemerintahan daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi, membangun metadata statistic sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, pengembangan infrastruktur serta penyelenggaraan otorisasi statistic sektoral di daerah.

5.2.2.15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup 1 (satu) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan diarahkan pada: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

5.2.2.16. Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Kegiatan diarahkan pada : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupate/Kota.

3) PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Kegiatan diarahkan pada : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Kegiatan diarahkan pada : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

5) PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

5.2.2.17. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perpustakaan, mencakup 2 (dua) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Bahan Pustaka, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dan Pengembangann Literasi Berbasis Inklusi Sosial

2) PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno, Pengembangan, Pengolahan dan

Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan dan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

5.2.2.18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perpustakaan, mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan diarahkan pada Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

2) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Kegiatan diarahkan pada Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana dan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

3) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

5.2.3. Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Pilihan

Program prioritas untuk Urusan Pemerintahan Pilihan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur mencakup 5 (lima) urusan sebagai berikut :

5.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Karena Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur hanya menyelenggarakan bidang perikanan yang diselenggarakan oleh PD Dinas Perikanan dengan program prioritas mencakup 4 (empat) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

kegiatan diarahkan pada : Penertiban Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penertiban Tanda Daftar bagi Pemudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

3) PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

kegiatan diarahkan pada : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

4) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan diarahkan pada: Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.3.2. Pariwisata

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata diselenggarakan oleh PD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencakup 3 (tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Kegiatan diarahkan pada : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Kegiatan diarahkan pada : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

5.2.3.3. Pertanian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh PD Dinas Pertanian dan Pangan mencakup 6 (enam) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pengawasan penggunaan sarana pertanian, Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota, Penyediaan benih/ bibit ternak dan Hiajuan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.

3) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

kegiatan diarahkan pada : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota.

5) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Penertiban Izin Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

5.2.3.4. Perdagangan

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan diselenggarakan oleh PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan mencakup 5 (lima) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

kegiatan diarahkan pada : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

kegiatan diarahkan pada : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

kegiatan diarahkan pada : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.

4) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

kegiatan diarahkan pada :

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota

5) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

kegiatan diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.

5.2.3.5. Perindustrian

Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian diselenggarakan oleh PD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan mencakup 3 (Tiga) program sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

kegiatan diarahkan pada : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

kegiatan diarahkan pada : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

3) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

kegiatan diarahkan pada : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota,

5.2.4. Program-program Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.4.1. Perencanaan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan diselenggarakan oleh PD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

1) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka agar dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dapat tersusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan petunjuk teknis maka kegiatan yang dilakukan adalah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan diarahkan agar seluruh program terdapat kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD dan antara RKPD dengan APBD maka kegiatan yang dilakukan adalah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Infrastruktur dan Kewilayahan

5.2.4.2. Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan diselenggarakan oleh PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan diarahkan kepada Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum dan ketepatan waktu realisasi SP2D dan penyampaian laporan keuangan juga ketepatan waktu penetapan Raperda APBD dan Perubahan APBD. Untuk itu maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan diarahkan agar terdapat kesesuaian barang milik daerah dengan nilai asset di neraca, sehingga kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan diarahkan agar tercapai kemandirian keuangan daerah dengan upaya yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

5.2.4.3. Kepegawaian

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian diselenggarakan oleh PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu

1) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan diarahkan pada Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN dengan kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5.2.4.4. Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu

1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan diarahkan kepada Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5.2.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan diselenggarakan oleh PD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan diarahkan pada Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sehingga kegiatan yang dilakukan adalah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

5.2.5. Program-program Prioritas pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh PD Inspektorat mencakup pelaksanaan 2 (dua) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan diarahkan pada persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/ inspektorat, sehingga kegiatan yang dilakukan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

2) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan diarahkan kepada persentase OPD yang menyatakan puas atas layanan inspektorat, sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

5.2.6. Program-program Prioritas pada Unsur Kewilayahan - Kecamatan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh PD Kecamatan mencakup pelaksanaan 5 (lima) Program, yaitu :

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan diarahkan kepada tercapainya nilai tertinggi indeks kepuasan masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2. Kecamatan Damar

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

3. Kecamatan Kelapa Kampit

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

4. Kecamatan Simpang Renggang

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

5. Kecamatan Gantung

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

6. Kecamatan Dendang

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

7. Kecamatan Simpang Pesak

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan diarahkan kepada tercapainya persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Kecamatan Manggar

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 2. Kecamatan Damar
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3. Kecamatan Kelapa Kampit
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4. Kecamatan Simpang Renggang
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 5. Kecamatan Gantung
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 6. Kecamatan Dendang
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 7. Kecamatan Simpang Pesak
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan diarahkan kepada Persentase tingkat ketenteraman dan ketertiban umum, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

 - 1. Kecamatan Manggar
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Kecamatan Damar
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 3. Kecamatan Kelapa Kampit
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4. Kecamatan Simpang Renggang
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 5. Kecamatan Gantung
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 6. Kecamatan Dendang
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 7. Kecamatan Simpang Pesak
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 4) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan diarahkan kepada Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

 - 1. Kecamatan Manggar
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 2. Kecamatan Damar
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 3. Kecamatan Kelapa Kampit
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 4. Kecamatan Simpang Renggang
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Kecamatan Gantung
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Kecamatan Dendang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 7. Kecamatan Simpang Pesak
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan diarahkan kepada Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Kecamatan Manggar
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 2. Kecamatan Damar
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 3. Kecamatan Kelapa Kampit
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 4. Kecamatan Simpang Renggang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 5. Kecamatan Gantung
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 6. Kecamatan Dendang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 7. Kecamatan Simpang Pesak
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5.2.7. Program-program prioritas pada Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup pelaksanaan 5 (lima) Program, yaitu :

- 1) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan dan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan,
- 2) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengawasan tentang politik serta budaya politik yang ada di masyarakat, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan dan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilahan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peran dan fungsi ormas/LSM/OKP, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan keselarasan masyarakat dalam menyikapi ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

5) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social

5.2.8. Program-program Prioritas pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

5.2.8.1. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Unsur Pendukung Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh PD Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, yaitu :

1) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan diarahkan kepada fasilitasi kerjasama daerah, kebijakan dan pembinaan keagamaan serta persentase regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran. Dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

2) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan diarahkan untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam, Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kenaikan tingkat Kematangan UKPBJ, sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pemantauan kebijakan sumber daya alam dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

3) PROGRAM ADMINISTRASI UMUM

Kegiatan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan pimpinan aparatur perangkat daerah dan indeks kematangan perangkat daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan penataan organisasi.



5.2.8.2. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Unsur Pendukung Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh PD Sekretariat DPRD melalui pelaksanaan satu Program, yaitu :

1) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan diarahkan kepada persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Pembahasan Kebijakan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Fasilitasi Tugas DPRD.

Berdasarkan alokasi Belanja, khususnya Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum yang dapat dijelaskan bahwa alokasi terbesar adalah untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Berikut ini disajikan perkiraan alokasi belanja untuk membiayai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Belitung Timur dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berbagai urusan pemerintahan :

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	221.267.421.219,00	
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	221.267.421.219,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.711.998.060,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	29.159.847.460,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	179.930.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.982.430.000,00	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	153.570.000,00	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	147.980.000,00	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	734.900.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	181.000.000,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	199.485.000,00	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.999.866.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	593.812.000,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.405.500.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95.000.000,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.590.623.460,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.000.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.996.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	169.600.000,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	159.501.000,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	750.080.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.994.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.729.580.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.036.551.000,00	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	99.798.000,00	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	149.066.000,00	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	199.700.000,00	
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	149.828.000,00	
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	199.572.000,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	399.478.000,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.199.768.000,00	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	149.066.000,00	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	399.478.000,00	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	598.836.000,00	
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	99.798.000,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	399.716.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	239.691.000,00	
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	159.424.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	599.864.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.345.300.000,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.221.248.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.000.000,00	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.994.000,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.990.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	114.994.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000,00	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	299.942.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.885.729.600,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	396.870.000,00	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	199.940.600,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	149.593.000,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	99.528.000,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	239.625.000,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	402.000.000,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.973.500.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100.000.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20.001.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.100.000.000,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.995.000,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.677.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	629.870.000,00	
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	10.000.000,00	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	229.500.000,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.000.000,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.977.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	245.000.000,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.976.000,00	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	20.000.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11.992.000,00	
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	49.425.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	46.358.000,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	26.408.000,00	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	26.408.000,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	19.950.000,00	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	19.950.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	65.995.000,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.995.000,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40.000.000,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.995.000,00	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	20.000.000,00	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.423.070.159,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	164.458.950.540,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164.448.153.540,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.997.000,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.884.000,00	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8.988.000,00	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.896.000,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.998.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.998.000,00	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	955.000.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.535.000,00	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.400.000,00	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.135.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.561.503.913,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.400.000,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.276.413,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.811.427.500,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.047.398.706,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.739.353,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.399.353,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	495.300.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.960.000,00	
	Dinas Kesehatan	88.353.787.543,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	88.353.787.543,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	88.353.787.543,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.054.081.228,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.112.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.112.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.945.304.382,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.923.877.382,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.427.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.500.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.132.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.477.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.695.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.635.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.714.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.886.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.725.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.405.011.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.560.000,00	
	Pengadaan Mebel	78.882.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.369.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	953.200.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.804.346,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.855.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610.949.346,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.217.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.860.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.495.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	656.612.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.263.197.420,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.505.356.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.357.875.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.781.392.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58.920.000,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.152.826.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	109.995.000,00	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	44.348.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.567.857.420,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	324.878.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.207.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	180.246.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.677.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	367.625.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.287.540.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.602.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76.886.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	541.011.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92.545.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	403.315.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	154.487.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.844.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	159.849.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.567.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.704.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	294.818.420,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.955.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	430.703.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.000.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	235.497.000,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.949.482.000,00	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	243.418.000,00	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.000.000,00	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.984.000,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	189.984.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.360.601.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	821.016.000,00	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	37.300.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	563.060.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	220.656.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.539.585.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.539.585.000,00	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	343.513.000,00	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.598.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.598.000,00	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	82.663.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	82.663.000,00	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.995.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.995.000,00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	169.257.000,00	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	169.257.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	332.394.895,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.598.895,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	61.598.895,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.669.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.669.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158.127.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	158.127.000,00	
	UPT RSD Kab. Belitung Timur	83.900.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	83.900.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	83.900.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.872.718.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.908.902.896,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.896.902.896,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303.217.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	
	Pengadaan Mebel	149.203.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.014.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.896.087.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.896.087.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.160.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.160.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.579.350.604,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.579.350.604,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.621.072.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.621.072.000,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.971.072.000,00	
	Pengembangan Rumah Sakit	1.650.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.406.210.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.406.210.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.406.210.000,00	
	UPT Puskesmas Manggar	4.404.990.984,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.404.990.984,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.404.990.984,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.866.536.484,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.556.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.962.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.188.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.270.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.631.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.505.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.291.484,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.291.484,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.689.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.633.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.056.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.980.000.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.980.000.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.029.717.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.395.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	74.800.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	48.960.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	36.720.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.915.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.322.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	138.760.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.160.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.940.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.812.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.130.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.560.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.340.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.260.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	205.760.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	493.437.500,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	493.437.500,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	493.437.500,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.300.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.300.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.300.000,00	
	UPT Puskesmas Mengkubang	2.986.059.984,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.986.059.984,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.986.059.984,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.636.341.484,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.860.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.609.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.251.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.111.484,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.320.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.791.484,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.370.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.120.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.250.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	850.000.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	850.000.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.031.968.500,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	223.004.000,00	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	149.968.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	51.956.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.080.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	808.964.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.202.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.180.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.018.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	159.022.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.080.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.315.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.025.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.680.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.800.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114.960.000,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.320.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	201.682.000,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.400.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	255.250.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	255.250.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	255.250.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	62.500.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.500.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62.500.000,00	
	UPT Puskesmas Gantung	4.003.655.073,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.318.693.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.318.693.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.990.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.999.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.991.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.991.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	936.363.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	102.336.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	53.856.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24.480.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	834.027.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.050.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.480.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.360.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	309.600.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.960.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	55.731.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.320.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.260.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.880.000,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	200.506.000,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	480.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.800.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.360.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	275.000.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	275.000.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	275.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.340.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.340.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.340.000,00	
	NON URUSAN	2.684.962.073,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	2.684.962.073,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.684.962.073,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.094.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.996.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.100.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.486.000,00	
	Pengadaan Mebel	15.762.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.724.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.780.976,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.780.976,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.763.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.763.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.542.838.097,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.542.838.097,00	
	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	3.588.823.728,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.588.823.728,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.588.823.728,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.314.355.228,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.098.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.590.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.898.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.896.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.681.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.033.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.003.728,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.611.728,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.590.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.280.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.310.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.116.663.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.116.663.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	906.296.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.887.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	99.975.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	49.912.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	37.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	719.409.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.828.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	720.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.080.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.023.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.040.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150.482.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	118.146.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.520.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.260.000,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.280.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	192.510.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.800.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	358.812.500,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	358.812.500,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	358.812.500,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.360.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.360.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.360.000,00	
	UPT Puskesmas Simpang Pesak	3.019.450.240,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.019.450.240,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.019.450.240,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.680.712.740,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.959.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.999.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.960.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.610.000,00	
	Pengadaan Mebel	7.683.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.927.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.158.740,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.158.740,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.985.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214.985.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	560.000.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	560.000.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.152.815.500,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	493.085.000,00	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	202.000.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	72.000.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	201.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.085.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	659.730.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.277.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.820.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.360.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.032.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.012.500,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.800.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.700.000,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	185.488.000,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	720.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.750.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	120.750.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.750.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	65.172.000,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.572.000,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	60.572.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.600.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.600.000,00	
	UPT Puskesmas Renggiang	3.194.792.370,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.194.792.370,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.194.792.370,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.663.360.370,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.249.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.267.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.982.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.117.480,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.317.480,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.273.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.280.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.993.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	474.720.890,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	474.720.890,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	904.524.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	256.797.000,00	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	46.970.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	99.964.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	39.874.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	39.984.000,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.005.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	647.727.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.800.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	24.570.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	210.182.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.900.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.960.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.260.000,00	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.200.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.535.000,00	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	960.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	960.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	528.187.500,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	528.187.500,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	528.187.500,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	98.720.500,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.562.000,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	58.562.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.158.500,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.158.500,00	
	UPT Puskesmas Dendang	2.183.185.988,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.183.185.988,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.183.185.988,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.345.528.988,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.381.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.118.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.721.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.170.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.801.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.571.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.772.000,00	
	Pengadaan Mebel	19.744.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.028.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.105.488,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.340.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.765.488,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.320.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.554.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.766.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	392.950.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	392.950.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	728.244.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	111.958.000,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33.970.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	49.912.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.076.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	616.286.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.200.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.120.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	38.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.734.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.600.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.900.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.800.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	185.692.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	73.750.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	73.750.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	73.750.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.663.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.463.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	28.463.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.200.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.200.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87.843.480.415,00	
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87.843.480.415,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.284.000.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.799.000.000,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.500.000.000,00	
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	1.634.000.000,00	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	5.325.000.000,00	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	100.000.000,00	
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.240.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.485.000.000,00	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.635.000.000,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	850.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.270.195.631,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.270.195.631,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.342.601.561,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.661.829.994,00	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	504.114.521,00	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	761.649.555,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.331.421.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.331.421.000,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.331.421.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.582.388.100,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.582.388.100,00	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	599.953.600,00	
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	249.892.800,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	349.797.200,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.382.744.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	500.000.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	500.000.000,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300.000.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.238.780.976,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.238.780.976,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.238.780.976,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.032.741.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	35.032.741.000,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	10.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	10.032.741.000,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	4.700.000.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.900.000.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	440.000.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	250.000.000,00	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	150.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	100.000.000,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	150.000.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.376.318.500,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	400.000.000,00	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000,00	
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	900.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	700.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	376.318.500,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	272.876.500,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	103.442.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.907.489.208,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.830.566.600,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.830.566.600,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	357.267.000,00	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.769.000,00	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.498.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	790.131.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.811.000,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.519.000,00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.000.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.989.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.864.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.948.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.281.026.000,00	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	472.230.000,00	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	702.970.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.192.000,00	
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.634.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.264.608,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	859.800.000,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.231.464.608,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.432.380.000,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.600.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.280.000,00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	386.000.000,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.100.000,00	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.400.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.039.868.600,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	751.077.000,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	650.850.000,00	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	650.850.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.227.000,00	
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	46.266.000,00	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	53.961.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	116.180.000,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	116.180.000,00	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	116.180.000,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.858.608.000,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.858.608.000,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.858.608.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.194.149.600,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.194.149.600,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	194.178.600,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.999.971.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.907.489.208,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.854.000,00	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	119.854.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.797.167.018,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	10.232.079.018,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.582.246.000,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.989.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	67.909.000,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	118.080.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.396.257.000,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.396.257.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	622.890.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	622.890.000,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.325.000,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	563.565.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.026.943.018,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.436.454.018,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.436.454.018,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.052.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.991.000,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.848.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.211.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.987.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.015.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.457.000,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.457.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.303.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.303.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.677.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	784.630.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.127.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.920.000,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.565.088.000,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.740.045.000,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	38.295.000,00	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	38.295.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.463.760.000,00	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	82.253.000,00	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.020.000,00	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	369.302.000,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9.865.000,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	974.320.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	237.990.000,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	176.160.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	61.830.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.825.043.000,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.313.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.013.000,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.739.227.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.736.728.000,00	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.499.000,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.996.000,00	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.996.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.500.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.512.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.994.000,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.989.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.536.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.995.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.998.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.078.000,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.078.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.377.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.629.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.016.748.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.040.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.050.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.590.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.400.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.387.598.228,00	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.387.598.228,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	965.855.000,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.418.000,00	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	37.418.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	928.437.000,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	837.900.000,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.097.000,00	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	29.440.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	329.716.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	259.453.000,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	82.168.000,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	58.500.000,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	55.222.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	63.563.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	70.263.000,00	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	17.650.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	32.000.000,00	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	20.613.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	323.956.000,00	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	27.420.000,00	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	27.420.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	296.536.000,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	76.500.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	220.036.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	844.068.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.250.000,00	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.250.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	749.818.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	749.818.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	11.300.000,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11.300.000,00	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11.300.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.912.703.228,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.936.656.800,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.936.656.800,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.300.000,00	
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.300.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.664.500,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.695.000,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.512.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.508.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.333.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.523.500,00	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.068.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.025.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.012.000,00	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	36.453.000,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.527.000,00	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.032.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.780.839.928,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.251.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.680.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.908.928,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.230.000,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.080.000,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.140.000,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.860.000,00	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.600.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.269.824.961,00	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.269.824.961,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	33.000.000,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	33.000.000,00	
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	33.000.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	699.950.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	699.950.000,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	430.002.000,00	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	269.948.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	88.000.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	88.000.000,00	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	88.000.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	189.616.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.092.000,00	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.456.000,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.636.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	163.524.000,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.862.000,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.138.000,00	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.524.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.259.258.961,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.679.000,00	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.679.000,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.927.644.984,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.927.644.984,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.000.000,00	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.000.000,00	
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	650.000.000,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.437.000,00	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	39.839.000,00	
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.720.000,00	
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.878.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.026.002,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	439.059.875,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.888.000,00	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.078.127,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.471.975,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.741.975,00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.800.000,00	
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.930.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	728.412.000,00	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	728.412.000,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	37.051.000,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.051.000,00	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.051.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	275.504.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.352.000,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.352.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	136.917.000,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	136.917.000,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.235.000,00	
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	83.235.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	53.046.000,00	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.046.000,00	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.046.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.163.000,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	218.648.000,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.648.000,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.648.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	348.507.500,00	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	348.507.500,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	228.507.500,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	58.231.000,00	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.500.000,00	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	18.731.000,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.000.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	86.124.000,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86.124.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	84.152.500,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	74.152.500,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.000.000,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	501.736.400,00	
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	501.736.400,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	501.736.400,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	501.736.400,00	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	141.119.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	360.617.400,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.925.031.435,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	13.925.031.435,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	534.331.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	397.569.000,00	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	397.569.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	136.762.000,00	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	136.762.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.343.047.194,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.113.742.992,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	176.387.000,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	937.355.992,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	48.246.000,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	48.246.000,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	181.058.202,00	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	181.058.202,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	117.774.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	117.774.000,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	117.774.000,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39.186.615,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	39.186.615,00	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.186.615,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	22.681.000,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.681.000,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.553.000,00	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.128.000,00	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	59.773.000,00	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	59.773.000,00	
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	59.773.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	347.605.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.605.500,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	195.546.000,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	101.908.500,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	50.151.000,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	94.677.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.677.000,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	94.677.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	116.825.580,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	116.825.580,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	19.756.000,00	
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	97.069.580,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.072.243.958,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.072.243.958,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	35.112.000,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	780.115.000,00	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.257.016.958,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.232.745.588,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.075.920.990,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.075.920.990,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.443.000,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.971.000,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.113.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.718.000,00	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.676.000,00	
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.042.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.833.598,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.080.000,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.753.598,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.330.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.510.000,00	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.600.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.220.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.070.876.869,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.070.876.869,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	391.408.530,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	391.408.530,00	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	21.707.000,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	81.193.059,00	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	288.508.471,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	513.718.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	189.206.000,00	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	189.206.000,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	324.512.000,00	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	204.750.000,00	
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	119.762.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	220.993.824,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	64.730.706,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	64.730.706,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	156.263.118,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	156.263.118,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	77.438.000,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	77.438.000,00	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	44.068.000,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	33.370.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.867.318.515,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.762.000,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.762.000,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.608.277.800,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.608.277.800,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.840.874,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.896.000,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.910.000,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.681.000,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.024.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.729.874,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.627.841,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.032.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.178.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.417.841,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.810.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.360.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000,00	
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.900.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.477.679.492,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.477.679.492,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.360.707.866,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.360.707.866,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.028.258.933,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	41.740.311,00	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	18.875.000,00	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	79.020.000,00	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	192.813.622,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	751.703.622,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	751.703.622,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18.285.000,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	89.048.311,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	644.370.311,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.365.268.004,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.146.426.512,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.146.426.512,00	
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	
2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.010.000,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.021.000,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.036.000,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.995.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.954.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.004.000,00	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.980.000,00	
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.980.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.989.492,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.989.492,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.862.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.000.000,00	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.312.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.628.325.500,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	718.636.000,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	53.747.500,00	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.945.500,00	
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	29.802.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	664.888.500,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	116.295.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	389.400.000,00	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	44.994.000,00	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	49.999.500,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.664.389.500,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	939.682.000,00	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	351.371.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	91.000.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	306.180.000,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	111.131.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	239.600.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	142.200.000,00	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	48.000.000,00	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	49.400.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	243.607.500,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	95.075.500,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	129.232.000,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.300.000,00	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.000.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	241.500.000,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	241.500.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.245.300.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.816.000,00	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	36.286.000,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	360.000.000,00	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	36.154.000,00	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	686.700.000,00	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	26.676.000,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	99.484.000,00	
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18.434.000,00	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	81.050.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.338.345.477,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	15.338.345.477,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.586.215.740,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.499.419.500,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.034.209.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.465.210.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.483.500,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	200.483.500,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	15.600.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	15.600.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	230.500.000,00	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17.496.000,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	133.103.000,00	
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39.901.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	233.720.496,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	102.801.748,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.937.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	41.981.748,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	308.732.244,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	165.000.000,00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	143.732.244,00	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.560.000,00	
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	59.560.000,00	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.200.000,00	
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.200.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.695.180.337,00	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	400.000.000,00	
2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	400.000.000,00	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.295.180.337,00	
2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000,00	
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.095.180.337,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.056.949.400,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.340.000,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.340.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.208.454.000,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.208.454.000,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	307.073.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.045.000,00	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.446.000,00	
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.582.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	871.480.000,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.000,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.090.000,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.100.000,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.994.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.300.000,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.116.000,00	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.352.000,00	
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.764.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.886.400,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.263.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.920.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.703.400,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.600.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.710.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.800.000,00	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.840.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.426.258.156,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.426.258.156,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	964.281.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	964.281.000,00	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	31.560.000,00	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	337.008.000,00	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	252.775.000,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	273.471.000,00	
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	69.467.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.302.834.970,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	978.107.470,00	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.089.932,00	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	930.017.538,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	324.727.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	62.135.500,00	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9.954.000,00	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	25.000.000,00	
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	19.473.000,00	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	133.167.000,00	
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	74.998.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.159.142.186,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.963.625.000,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.963.625.000,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.877.000,00	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.877.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.152.000,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.036.000,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.126.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.990.000,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.811.000,00	
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	482.286.000,00	
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.792.000,00	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.697.000,00	
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.450.000,00	
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.586.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.843.690,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151.859.160,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.580.000,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.404.530,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.833.496,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.563.496,00	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.170.000,00	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.100.000,00	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.861.970.425,00	
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.861.970.425,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	71.445.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	71.445.000,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	71.445.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	173.341.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.341.500,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	173.341.500,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	280.563.000,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	280.563.000,00	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	247.563.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.336.620.925,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.336.620.925,00	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.336.620.925,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.595.239.517,00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.595.239.517,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.246.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.026.000,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.026.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	30.220.000,00	
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	30.220.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	494.239.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	494.239.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	489.889.000,00	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4.350.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	308.997.500,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	308.997.500,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	270.937.500,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	38.060.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	547.321.500,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	547.321.500,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100.181.500,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	288.879.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	158.261.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	47.143.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.143.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	47.143.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.158.292.517,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.172.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.172.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.495.253.716,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.495.253.716,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.200.000,00	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.200.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	658.309.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.340.000,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.048.000,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.716.000,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.465.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.905.000,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.975.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.548.000,00	
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.942.000,00	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.606.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.305.529.801,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	278.656.362,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.260.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	843.613.439,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.280.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.430.000,00	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.230.000,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.620.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.355.673.312,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	14.355.673.312,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	925.000.000,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	650.000.000,00	
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.000.000,00	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	175.000.000,00	
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	50.000.000,00	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	400.000.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000,00	
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	150.000.000,00	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.091.848.100,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.025.000.000,00	
2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	75.000.000,00	
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	250.000.000,00	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	700.000.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	975.597.100,00	
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	395.000.000,00	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	499.999.100,00	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.598.000,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	509.265.000,00	
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	50.000.000,00	
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	349.357.000,00	
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	59.908.000,00	
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.079.998.000,00	
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.000.000.000,00	
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	79.998.000,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	501.988.000,00	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	226.011.000,00	
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	75.977.000,00	
2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	200.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	277.681.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	277.681.000,00	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	52.681.000,00	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	125.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.061.144.212,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.237.000,00	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.237.000,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.455.816.195,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.455.816.195,00	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.845.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.869.000,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.976.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000,00	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.354.000,00	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.151.000,00	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.203.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.571.089.755,00	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	664.710.804,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.393.152,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.985.799,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.259.802.262,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.802.622,00	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	782.999.640,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	504.989.580,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	504.989.580,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	504.989.580,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	504.989.580,00	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	289.996.580,00	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	99.998.000,00	
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	114.995.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	281.360.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	281.360.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	281.360.000,00	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.346.000,00	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.872.000,00	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	193.142.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.249.375.114,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.249.375.114,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.210.541.500,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	999.998.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	999.998.000,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.995.500,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	199.995.500,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.548.000,00	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	10.548.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	64.994.500,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.994.500,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	64.994.500,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	64.971.000,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.971.000,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	64.971.000,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.000.000,00	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	65.000.000,00	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	65.000.000,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.843.868.114,00	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.733.717.500,00	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.733.717.500,00	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.000.000,00	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.547.000,00	
2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.547.000,00	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.939.614,00	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.900.000,00	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	901.039.614,00	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.664.000,00	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.300.000,00	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.380.000,00	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.984.000,00	
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.148.703.992,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.148.703.992,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	456.073.236,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370.401.236,00	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.249.000,00	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	293.872.236,00	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.280.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.672.000,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	67.784.000,00	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.888.000,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11.048.000,00	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	11.048.000,00	
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	11.048.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.681.582.756,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.644.889.780,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.644.889.780,00	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.268.000,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.000,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.255.000,00	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.595.000,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.778.000,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.648.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.306.976,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.256.000,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.270.000,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.780.976,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.118.000,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.898.000,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.520.000,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.700.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	259.240.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	259.240.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	85.206.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	21.960.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	63.246.000,00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	34.285.000,00	
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	34.285.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	139.749.000,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	73.368.000,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	66.381.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.630.337.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	14.630.337.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.944.639.400,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.115.826.700,00	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	322.889.000,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	204.177.000,00	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.588.760.700,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	692.922.200,00	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	494.810.200,00	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	198.112.000,00	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	82.809.500,00	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	82.809.500,00	
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.081.000,00	
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	53.081.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.048.000.000,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	327.406.000,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	158.600.000,00	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	168.806.000,00	
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.255.000,00	
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.255.000,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.662.339.000,00	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.842.500,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.113.081.000,00	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	365.999.000,00	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.416.500,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	122.131.500,00	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	122.131.500,00	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	76.279.500,00	
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	45.852.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.194.088.000,00	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	264.552.500,00	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	264.552.500,00	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	673.898.500,00	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	673.898.500,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.255.637.000,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	905.682.500,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.954.500,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.321.478.100,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.480.000,00	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	162.480.000,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.541.586.100,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.541.586.100,00	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.350.000,00	
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.850.000,00	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.500.000,00	
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57.000.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.649.000,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.023.000,00	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.345.000,00	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.643.000,00	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.004.000,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.136.000,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.498.000,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.658.000,00	
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.658.000,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.875.000,00	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	221.319.000,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.600.000,00	
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.220.000,00	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.736.000,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.880.000,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	394.440.000,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.050.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.000.000,00	
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	307.140.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.228.835.360,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.228.835.360,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.811.793.360,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.485.000.000,00	
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	575.000.000,00	
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	810.000.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.212.273.612,00	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	702.000.000,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.099.993.212,00	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	410.280.400,00	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	114.519.748,00	
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	49.969.000,00	
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	64.550.748,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.411.711.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.411.711.000,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	549.540.000,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	862.171.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.005.331.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	980.331.000,00	
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	980.331.000,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	16.169.796.500,00	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	16.169.796.500,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.285.158.000,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.012.658.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.012.658.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	272.500.000,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	272.500.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	218.091.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	18.874.000,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan	18.874.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	199.217.000,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	199.217.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	252.672.000,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	234.499.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	234.499.000,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	18.173.000,00	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	18.173.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99.994.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	99.994.000,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	99.994.000,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	89.999.000,00	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.999.000,00	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	89.999.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	694.291.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	694.291.000,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	148.132.000,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	278.956.000,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	149.325.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	97.892.000,00	
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.986.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.529.591.500,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.332.000,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.332.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.135.250.000,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.135.250.000,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	228.000.000,00	
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,00	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.500.000,00	
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.500.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.555.000,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.967.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.140.000,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.913.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.115.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.848.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.572.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.497.000,00	
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.873.000,00	
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.624.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	917.707.500,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.800.000,00	
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	757.907.500,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.250.000,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.730.000,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.160.000,00	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.130.000,00	
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.980.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.425.057.390,00	
3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.425.057.390,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.518.081.590,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.518.081.590,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.318.381.590,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.462.760.000,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.900.000,00	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.900.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.405.920.000,00	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	67.450.000,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.338.470.000,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.940.000,00	
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.990.000,00	
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.975.000,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.975.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.731.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.731.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.231.000,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.500.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.279.484.800,00	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.994.000,00	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.994.000,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.683.084,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.060.683.084,00	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000,00	
3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.000.000,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.995.000,00	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.256.000,00	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.246.000,00	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.384.000,00	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.151.000,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.850.000,00	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.640.000,00	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.468.000,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.843.000,00	
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.843.000,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	848.239.716,00	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	257.740.488,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.220.000,00	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	462.279.228,00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.730.000,00	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.540.000,00	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.600.000,00	
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.590.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.347.488.000,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.282.768.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.282.768.000,00	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	7.673.000,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	79.667.000,00	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	18.630.000,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.141.485.000,00	
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	35.313.000,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	4.261.000,00	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.261.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	4.261.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.459.000,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.459.000,00	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	60.459.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	SEKRETARIAT DAERAH	47.167.955.500,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	47.167.955.500,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.980.214.500,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	282.422.500,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	262.575.500,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	19.847.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.032.753.000,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.335.420.000,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.333.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.608.000.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	588.294.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	237.674.000,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	133.186.000,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	217.434.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	76.745.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	76.745.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.433.153.500,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	330.114.000,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	67.750.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	192.350.000,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	70.014.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	173.955.000,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	103.535.000,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.420.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	869.690.500,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	396.447.000,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	291.870.000,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	181.373.500,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	59.394.000,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	16.768.000,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	42.626.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.754.587.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.908.415.000,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.808.415.000,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.327.000,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.327.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.823.000,00	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.117.000,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.706.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.411.159.000,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.261.000,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675.026.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.722.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.150.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.667.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.089.000,00	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.578.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.865.673.500,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	839.900.000,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.544.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.909.229.500,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.855.195.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	603.550.000,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.615.930.000,00	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	70.000.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	366.810.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.350.000,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.555.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	884.996.500,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	270.000.000,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.996.500,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.181.116.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	199.978.000,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	199.744.000,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.781.394.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	315.721.500,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	62.832.000,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	71.804.500,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	138.620.000,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	42.465.000,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.909.494.000,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	733.900.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	702.474.000,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	473.120.000,00	
4	SEKRETARIAT DPRD	35.222.020.400,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	35.222.020.400,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.673.151.500,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.679.928.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.499.993.000,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	49.995.000,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	89.940.000,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	40.000.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	101.950.000,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	20.420.000,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.420.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	20.420.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	20.420.000,00	
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	9.237.500,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	11.032.500,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.956.561.000,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	686.940.500,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	601.111.500,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	749.549.500,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	596.841.500,00	
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	753.173.500,00	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	132.888.000,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	657.564.000,00	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	778.492.500,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.037.528.000,00	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	300.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	750.000.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	402.000.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.000.000,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	192.732.000,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.796.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	167.000.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	482.185.500,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12.990.000,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	29.775.500,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	439.420.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.414.999.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.200.000.000,00	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	19.999.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	195.000.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.548.868.900,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.087.738.400,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.838.400,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.450.000,00	
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.450.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.400.000,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.400.000,00	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.591.059.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.983.000,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	727.941.000,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	88.081.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	156.963.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.996.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.995.000,00	
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.971.856.000,00	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.446.858.000,00	
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.380.000,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.380.000,00	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.798.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.440.000,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.100.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.900.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	886.200.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.573.000,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.200.000,00	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.798.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.350.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.975.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.565.509.500,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.521.747.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	856.262.500,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	187.500.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	273.633.000,00	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.002.000,00	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	199.988.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	72.543.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	100.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	PERENCANAAN	9.068.376.405,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.068.376.405,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	510.497.500,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	394.628.000,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.592.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	54.470.000,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.200.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	320.366.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	115.869.500,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	115.869.500,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.557.698.410,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	947.580.410,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156.225.000,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	62.707.910,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	61.171.000,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	55.208.000,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	155.856.000,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	117.355.000,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39.115.000,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	299.942.500,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	286.579.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.315.000,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.037.000,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.199.000,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	45.473.000,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.671.000,00	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.001.000,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	37.106.000,00	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	39.777.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	323.539.000,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.300.000,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.868.000,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.085.000,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	28.758.000,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108.450.000,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.528.000,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24.950.000,00	
5	PERENCANAAN	41.600.000,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	41.600.000,00	
5	PERENCANAAN	9.068.376.405,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.041.780.495,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.082.000,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000,00	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.752.587.997,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.749.999.997,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.588.000,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.000.000,00	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.000.000,00	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.126.000,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.283.000,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.129.000,00	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.920.000,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.960.000,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.984.000,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.000.000,00	
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.850.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.503.000,00	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.499.000,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.004.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.501.498,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.680.000,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924.821.498,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.980.000,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.650.000,00	
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.400.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.320.000,00	
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.960.000,00	
5	KEUANGAN	114.798.708.411,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	114.798.708.411,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	99.952.504.620,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	684.098.500,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	49.562.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46.996.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	131.741.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	133.682.500,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.751.000,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6.844.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	54.621.000,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	69.159.500,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	185.741.500,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	751.330.492,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	362.259.992,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	52.002.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	163.388.000,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	124.601.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.079.500,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	458.617.244,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	84.269.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60.366.000,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	181.059.244,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	89.809.000,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	43.114.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98.058.458.384,00	
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	114.946.000,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	91.027.303.438,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.916.208.946,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	784.996.240,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	784.996.240,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	81.973.500,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	49.114.000,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.591.000,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	270.409.370,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	251.585.370,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	74.323.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.683.968.232,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.683.968.232,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	116.173.000,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	57.999.000,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	301.822.244,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50.607.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	411.816.492,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	29.262.500,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	56.236.000,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.386.000,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	632.665.996,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.377.239.319,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.490.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.983.000,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.507.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.985.765.099,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.940.765.099,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.000.000,00	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	906.852.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.524.000,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.985.000,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.984.000,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.549.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.631.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.540.000,00	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.639.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.193.000,00	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	93.742.000,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.451.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.020.480,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	111.096.496,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.051.748,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.872.236,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.918.740,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.231.748,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.136.992,00	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.720.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.830.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
5	KEPEGAWAIAN	7.882.177.834,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.882.177.834,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.126.412.000,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	511.796.500,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7.645.000,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	361.932.000,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.311.500,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	58.074.500,00	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	40.423.500,00	
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4.410.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	635.376.500,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	24.006.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	187.221.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	424.149.500,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	863.718.500,00	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	72.331.000,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	219.435.500,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	571.952.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	115.520.500,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	115.520.500,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.755.765.834,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.684.000,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.451.000,00	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.233.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.770.540.834,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.751.747.834,00	
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.793.000,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.400.000,00	
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.400.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.508.000,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.853.000,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.968.000,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.812.000,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.875.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.098.000,00	
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.098.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.105.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	214.850.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.440.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.815.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.430.000,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.370.000,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.080.000,00	
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.980.000,00	
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.369.776.500,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.369.776.500,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	128.794.000,00	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	128.794.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.240.982.500,00	
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	82.137.000,00	
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	430.072.000,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	728.773.500,00	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.129.992.000,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.129.992.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.129.992.000,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	156.152.000,00	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	156.152.000,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	112.337.000,00	
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	112.337.000,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	281.943.000,00	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	281.943.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	579.560.000,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	169.994.000,00	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	311.371.000,00	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	98.195.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	INSPEKTORAT DAERAH	13.130.460.976,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	13.130.460.976,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.386.864.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.134.073.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	104.640.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	324.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	149.400.000,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	193.200.000,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	168.890.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.943.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	252.791.000,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	118.741.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	134.050.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	451.632.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	451.632.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	101.970.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	349.662.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.880.396.976,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.500.000.000,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.500.000.000,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	582.674.000,00	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.650.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	541.024.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	952.841.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.323.000,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.331.000,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.897.000,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.162.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.491.745.000,00	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	956.170.000,00	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.909.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.456.976,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.020.000,00	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.890.000,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.780.976,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.680.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.550.000,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.950.000,00	
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.180.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7	KECAMATAN	21.410.043.897,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar	3.725.822.132,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.332.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.995.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.995.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.337.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.337.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393.098.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	393.098.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	393.098.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.633.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.633.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46.976.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.657.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.955.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.955.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.955.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.680.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.680.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.680.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.131.124.132,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.523.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.523.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.148.564.400,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.564.400,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.906.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.200.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.309.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.702.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.695.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.215.732,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.880.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.835.732,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.915.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.135.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.310.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.070.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.400.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung	3.641.287.228,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.989.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.989.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.989.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	519.993.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	519.993.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	519.993.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.468.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.468.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.468.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.976.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.976.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.976.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.999.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.999.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.999.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.083.862.228,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.954.931.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.954.931.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.200.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.200.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.495.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.921.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.168.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.986.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.420.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.386.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.386.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.499.228,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.799.228,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.351.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.351.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit	3.841.739.987,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.168.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.994.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.994.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.174.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.174.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	345.239.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	345.239.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	345.239.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.018.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.018.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.231.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.787.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.161.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.161.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.161.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.151.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.151.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.876.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.550.000,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.725.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.364.002.987,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.380.282.690,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.380.282.690,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.898.510,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.977.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.613.880,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.507.630,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.800.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.551.787,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.884.500,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.267.287,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.270.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.190.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.480.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.600.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak	3.186.643.550,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.524.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.540.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.540.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.984.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.984.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	381.027.500,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	381.027.500,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	381.027.500,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.848.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.848.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.848.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.207.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.207.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.795.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.412.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.721.037.050,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.990.318,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.929.990.318,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.281.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.990.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.472.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.152.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.152.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.815.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.835.732,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.835.732,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.930.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.890.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.040.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	400.141.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.137.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.137.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.137.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.501.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	318.501.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	318.501.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.803.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.803.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.803.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.700.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.700.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.400.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.600.000,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.700.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggang	3.317.489.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	356.998.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	356.998.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	356.998.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.820.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.820.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.820.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.996.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.996.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.996.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.328.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.328.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.973.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.999.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.990.000,00	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.636.000,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.730.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.843.347.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.840.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.840.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.862.242.520,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.242.520,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.385.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.957.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.429.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.999.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.758.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.378.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.380.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.317.480,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.817.480,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.804.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.160.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.650.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.024.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.970.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang	3.296.921.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.972.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.972.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.972.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	329.991.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	300.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.991.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	29.991.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000,00	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.914.314.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.907.856.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.856.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.276.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.230.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.690.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.142.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.349.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.793.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.780.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.969.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.811.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.260.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.990.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.872.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.998.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.400.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.785.578.317,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.785.578.317,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.836.158.000,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.836.158.000,00	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	229.515.000,00	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	281.678.000,00	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.820.553.000,00	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	444.112.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60.300.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18.384.776.000,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	18.384.776.000,00	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17.406.365.000,00	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	239.200.000,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	59.841.000,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	112.670.000,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	566.700.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	302.261.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	302.261.000,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.281.000,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	111.580.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	147.400.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	805.215.500,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	805.215.500,00	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	123.960.000,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	401.666.500,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42.126.000,00	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	237.463.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.954.917.841,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.954.917.841,00	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	735.793.341,00	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	238.060.000,00	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	98.077.500,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75.760.000,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	166.550.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	640.677.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.502.249.976,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.329.500,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.983.000,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.773.500,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.573.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.453.555.500,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.349.212.000,00	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.759.500,00	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.820.000,00	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.764.000,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.600.000,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.600.000,00	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.000.000,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.071.000,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.076.000,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.928.000,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.560.000,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.892.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.615.000,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.105.000,00	
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.105.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.771.228,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	211.778.740,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000,00	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.325.496,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.466.992,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.817.748,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.226.000,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.381.748,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.810.000,00	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.400.000,00	
X	NON URUSAN		
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	6.594.346.074,00	
1.02.0.00.0.00.03.0004	UPT Puskesmas Gantung	2.684.962.073,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.093.000,00	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.996.000,00	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.000,00	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.100.000,00	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.486.000,00	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.762.000,00	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.724.000,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.780.976,00	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.780.976,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.754.000,00	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.763.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.542.838.097,00	
X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.542.838.097,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	55.859.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000,00	
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.443.000,00	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.259.000,00	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.400.000,00	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.700.000,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	400.000.000,00	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	588.432.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.491.745.000,00	
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	395.400.000,00	
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.266.000,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.456.976,00	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.766.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	2.829.737.001,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.812.278.277,00	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.812.278.277,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.780.000,00	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.476.000,00	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.796.000,00	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.428.000,00	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.440.000,00	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.640.000,00	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.486.000,00	
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.026.000,00	
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.460.000,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.762.724,00	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000,00	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.762.724,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.430.000,00	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.170.000,00	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.260.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang	35.356.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.276.000,00	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.356.000,00	

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran. Optimalisasi pembiayaan daerah diarahkan melalui:

- a. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan strategi dan prioritas :
 - Efisiensi dan Efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah;
 - Optimalisasi penjualan kekayaan daerah berbasis analisa ekonomi biaya pemeliharaan;
- b. Minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah, dengan strategi prioritas selektif dan berdasarkan pendekatan analisa ekonomi di dalam penyertaan modal.

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah.
2. pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Dana Talangan, Pemberian Pinjaman Dana Bergulir; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk dapat diminimalkan sehingga pembiayaan dianggarkan dapat untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam Kebijakan umum pembiayaan, bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah,serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan pembiayaan netto sebesar Rp 106.703.068.094.

Rincian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	110.703.068.094	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	110.703.068.094	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	110.703.068.094	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	Perda No 7 Tahun 2023
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	106.703.068.094	

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disajikan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini diharapkan menjadi arah dan pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diajukan bersama-sama dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 Ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Mudah-mudahan pada waktunya nanti, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dapat disepakati bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif sehingga proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat segera dilakukan.

Akhirnya, semoga dengan tersusun dan dibahasnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi instrumen yang penting dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sangat berguna dalam proses pembangunan di Belitung Timur. Terima Kasih.